



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT UTAMA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I NYOMAN WARA
2. Jabatan : INSPEKTUR UTAMA
3. NHK : 168618

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.644.850.000**

1. Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 7.700.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/140 m2 di KAB / KOTA  
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/48 m2 di KAB / KOTA  
GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/45 m2 di KAB / KOTA  
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 663.400.000
5. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA,  
HASIL SENDIRI Rp. 96.750.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 296.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI  
Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI  
Rp. 180.000.000
3. MOTOR, YAMAHA R15 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
32.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.  
50.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
27.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 200.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	948.936.145
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.089.786.145
III. HUTANG	Rp.	495.151.730
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.594.634.415

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.